

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tana Toraja terkenal dengan nama *Tondok Lepongan Bulan Tana Matari' Allo*, yang berarti negeri dengan bentuk pemerintahan dan kemasyarakatan yang merupakan suatu kesatuan yang utuh-bulat bagaikan Bulan dan Matahari, namun pada tahun 1998 isu pemekaran sudah muncul, terutama Isu pemekaran Toraja Barat dan Isu Pemekaran Toraja Utara namun pada masa itu presiden hanya mengizinkan untuk pemekaran satu kabupaten saja sehingga Toraja Utara mulai dengan pemekaran pada tahun 2008 Toraja Utara memekarkan diri menjadi kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Toraja Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu kotanya adalah Rantepao, Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja, yang disahkan pada 24 juni 2008, Presiden Republik Indonesia Mengesahkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Toraja Utara. Alasan utama terdorongnya pemekaran bahwa untuk percepatan pembangunan dan pelayanan publik (Kesehatan, pendidikan serta infrastruktur) (Diskominfo, 2025)

Olehnya itu dalam isu pemekaran kabupaten Toraja barat memiliki keterkaitan dengan alasan terbentuknya Kabupaten Toraja Utara, namun dalam realitasnya isu pemekaran Toraja Barat ini tidak terealisasi atau terwujud dikarenakan dalam masa itu panitia pemekaran toraja barat kurangnya dukungan dalam hal suntikan dana. Awal isu pemekaran Toraja Barat muncul pada tahun 1998 - 2003 yang sempat terhenti, selanjutnya pada september 2013 Isu pemekaran Toraja Barat Muncul Kembali dan terus berkembang dilihat dari adanya penyelenggaraan pertemuan akbar panitia pemekaran pada Kamis 28 November 2013 yang diketuai oleh bapak Alm. Ir madao, namun kurangnya dukungan dari Masyarakat sehingga isu pemekaran ini terhenti Kembali (Heriyanto Rantelino, 2014), sehingga pada agustus 2022 isu ini Kembali terdengar yang diketuai oleh Drs. Yusuf Sura' tandirerung, dalam perjuangan panitia sehingga pada 24 september 2024 DPRD Tana Toraja Resmi menyetujui Usulan pemekaran Daerah otonomi baru pada sidang paripurna yang dihadiri oleh 19 Anggota (DPRD Tana Toraja, Pimpinan DPRD, Panitia DOB Toraja Barat, Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Desa) lebih nyata pada Tahun 2025 Bupati Tana Toraja Menerbitkan SK (No:268/VII/TAHUN 2025) tentang persetujuan pembentukan CDOB (calon daerah otonom baru) Kabupaten tana toraja tertanggal 11 juli 2025. (Marselinus Hera, 2025).

Dalam penelitian ini fokus mengkaji mengenai aksi kolektif dalam isu pemekaran kabupaten toraja barat, aksi kolektif muncul dengan adanya pembentukan panitia pemekaran sebagai respon Masyarakat yang menginginkan pemerataan pembangunan dalam peningkatan pelayanan publik, hal ini merupakan

salah satu langkah strategis dalam mengoptimalkan manajemen wilayah dan kesejahteraan Masyarakat di Toraja bagian Barat, dorongan Tindakan kolektif muncul karena adanya tuntutan dari Masyarakat Toraja bagian Barat untuk mencapai tujuan bersama yaitu Pemekaran kabupaten Toraja Barat, jika aksi kolektif ini mencapai tujuan atau berhasil dilaksanakan harapannya dapat memberikan peluang baru bagi masyarakat di Toraja Bagian Barat sehingga pemerintah daerah dapat lebih fokus mengelola sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) serta memperkuat infrastruktur sebagai roda penggerak Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pemekaran daerah. Undang-undang terkait pembentukan daerah berupa pemekaran daerah diatur pada UU NO. 23 Tahun 2014 Pada dasarnya undang-undang tersebut bermaksud untuk memberikan keleluasan bagi setiap daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Hal ini berangkat dari pemikiran akan luasnya wilayah dan beragamnya budaya dan adat penduduk di kepulauan ini (Gustiana A, 2015)

Dalam isu pemekaran Kabupaten Toraja Barat mendapat sambutan hangat dari beberapa pihak seperti tokoh agama, masyarakat, pemerintah bahkan pemuda karena dinilai dapat memberi peluang bagi Masyarakat Toraja bagian Barat terhadap pembangunan dan pelayanan publik yang sudah lama kurang diperhatikan, Namun dalam isu pemekaran kabupaten toraja barat ada pihak yang tidak setuju dikarenakan anggapan bahwa pemecah belah kesatuan adat dan budaya masyarakat *Toraja sebagai tondok lepongan bulan tana matari' allo*, yang berarti negeri dengan bentuk pemerintahan dan kemasyarakatan yang merupakan suatu kesatuan yang utuh-bulat bagaikan bulan dan matahari. (Anastasya saidong 2025). Namun dalam realitanya isu pemekaran mendapat dukungan besar dari Tokoh Adat yang mengerti terkait *tondok lepongan bulan tana matari' allo*, dijelaskan bahwa dalam pandangan adat Tana toraja di bagi menjadi 3 Wilayah adat yaitu *padang di padang di ma'dikai* "Bagian Barat Toraja" (yang dimana sikap menghargai serta melihat semua orang sebagai saudaranya/keluarga, tidak ada orang lain) *Tallu lembangna atau padang di puanggi* "Tana Toraja" (Makale, Mengkendek, Sangalla) dan *padang disiambe' (siambe sia indo')* (Toraja Utara) Ujar Tokoh Adat.

Dalam penelitian (Ria et al., 2025) terkait Tari Nenemo sebagai Identitas Masyarakat kabupaten Tulang Bawang Barat, merupakan sebuah representasi identitas yang dirancang oleh pemerintah daerah dilihat dari dinamika perubahan sosio-politik, Tari Nenemo pada tahun 2016 muncul sebagai respons strategis terhadap kondisi tersebut guna memenuhi suatu kebutuhan jawaban akan kerangka identitas yang baru saja lahir. Tari Nenemo tidak hanya menjadi sarana hiburan, melainkan juga representasi simbolik dari keberagaman nilai dan kearifan lokal yang ada dalam tradisi masyarakat Lampung, dalam tari nenemo ekspresi tubuh dan wajah para penari turut memainkan peran penting dalam menyampaikan emosi dan nilai kehidupan, sehingga penonton dapat merasakan intensitas pesan yang hendak disampaikan, dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce memberikan kerangka analisis yang mendalam terhadap elemen-

elemen simbolik dalam Tari Nenemo dalam konteks perubahan sosial dan politik yang terus berlangsung. Namun dalam penelitian ini kurang memperlihatkan solidaritas sosial antar Masyarakat, serta kurang melihat bagaimana kesenjangan yang terjadi antara kabupaten induk dan kabupaten yang ingin mekar pada masa pemekaran wilayah.

Di sisi lain Penelitian (Lahagu et al., 2024) dari terkait Pandangan Masyarakat Islam Nias terhadap isu pemekaran provinsi kepulauan nias. Pada tahun 2010, BPP-PKN memulai Langkah-langkah untuk mendorong terbentuknya Provinsi Kepulauan Nias dengan menyampaikan aspirasi masyarakat Nias kepada Gubernur Sumatera Utara, Alasan dibalik pembentukan Provinsi Kepulauan Nias adalah karena mempertimbangkan faktor rentang kendali dalam administrasi pemerintahan. Dalam konteks administratif, pelayanan yang disediakan oleh pemerintah tingkat daerah tingkat I (provinsi) terhadap koordinasi dengan pemerintah pusat (nasional) cenderung lebih efektif jika dibandingkan dengan daerah tingkat II seperti kabupaten atau kota, olehnya itu terdapat pandangan positif maupun negatif terhadap pemekaran wilayah menjadi provinsi Kepulauan Nias. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui jika pemekaran sebagai kesempatan untuk pembangunan yang lebih baik dengan fokus pada kebutuhan lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat kekhawatiran akan dampaknya terhadap identitas dan budaya Nias, termasuk masyarakat Islam di sana. Sejumlah informan berharap agar kepentingan dan aspirasi masyarakat Islam diakomodasi, serta memiliki ruang untuk menjaga nilai-nilai agama dan budaya mereka. Selain itu, dapat dipastikan bahwa pemekaran tidak hanya membawa perubahan positif dalam infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga memperkuat persatuan dan kerukunan antar komunitas. sehingga pemekaran dapat menjadi landasan kemajuan yang berkelanjutan bagi semua penduduk, termasuk masyarakat Islam Nias, Pemekaran wilayah ini mendapat pandangan yang beragam dari masyarakat, meskipun dianggap sebagai peluang untuk pembangunan yang lebih baik dengan fokus pada kebutuhan lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran ini berpotensi berdampak signifikan bagi komunitas Islam Nias secara sosial dan ekonomi, dalam penelitian ini membahas Gerakan sosial serta aksi kolektif terkhusus pada komunitas Islam nias yang dimana komunitas tersebut merasa bahwa dengan adanya pemekaran ini menjadi pertanda baik secara sosial, pemekaran ini dapat membawa perubahan dalam dinamika sosial masyarakat, baik dalam hal identitas maupun hubungan antarwarga dalam keberagaman dalam struktur sosial masyarakat, sehingga setiap individu, termasuk komunitas Islam Nias, merasa diakui dan dihargai, Namun dalam penelitian ini cenderung terbatas pada deskripsi kebijakan, dan analisis konseptual pemekaran tanpa menggali mekanisme dan dinamika aksi kolektif warga secara mendalam serta kurangnya konsep terkait Tujuan dari pemekaran itu sendiri.

Pada dasarnya isu pemekaran merupakan isu yang menarik dan selalu diperbincangkan baik di media massa, elektronik maupun media cetak sehingga

mendapat perhatian dari banyak kalangan, mulai dari akademisi, praktisi hingga politisi yang tujuannya untuk mengembangkan daerah dan mensejahterakan Masyarakat, di awal tahun 1999 pemerintah memberlakukan pemekaran daerah secara besar-besaran sampai akhirnya pemerintah sendiri kewalahan membentung tuntutan tersebut, Derasnya gelombang pemekaran daerah ini kemudian berdampak pada timbulnya berbagai masalah di daerah yang baru dimekarkan Terkait persoalan tersebut, kemudian dalam konsultasi antara pimpinan DPR dan presiden di Istana negara tanggal 14 Juli 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali meminta dilakukan moratorium (Bukan produk Hukum karena tidak memiliki PP) pemekaran daerah. Artinya, usulan pembentukan daerah otonom baru untuk sementara harus dihentikan sambil menunggu evaluasi lebih lanjut. Menurut presiden, selama 10 tahun terakhir, dari 2005 daerah baru hasil pemekaran, 80% gagal menjalankan tugasnya. APBN yang disalurkan ke daerah untuk pemekaran pun selama ini lebih digunakan untuk membangun gedung-gedung atau untuk membeli mobil pejabat daerah, Pernyataan presiden tersebut memang didukung oleh fakta bahwa sebagian besar daerah hasil pemekaran justru membebani keuangan Negara. Hasil survei beberapa lembaga penelitian (Bappenas-2005, DRSP-USAID-2007, UNDP-2007) juga menunjukkan kesimpulan yang sama, yakni lebih dari 80% daerah pemekaran belum dapat memperlihatkan peningkatan pembangunan daerah setempat sehingga disimpulkan bahwa pelaksanaan pemekaran daerah belum mencapai tujuan otonomi daerah (Santoso, 2020)

Dalam sebuah pemekaran wilayah kabupaten perlu adanya pemenuhan syarat dasar seperti, kewilayahan yang didalamnya minimal ada 5 (Lima) kecamatan yang akan bergabung sementara pada isu pemekaran kabupaten toraja barat memiliki 8 (delapan) kecamatan yang akan bergabung, pada syarat administrasi administrasi terkait persetujuan DPRD dan Bupati, dengan terbitnya SK (No:268/VII/TAHUN 2025) tentang persetujuan pembentukan CDOB (calon daerah otonom baru) Kabupaten tana toraja tertanggal 11 juli 2025. Dan syarat kesejahteraan yang didalamnya membahas terkait potensi ekonomi dan pendapatan asli daerah, dalam isu pemekaran kabupaten toraja barat ini, sudah melihat potensi di sektor pertanian, peternakan dan panorama alam yang menjanjikan sehinggaa jika di kelola dengan baik hal ini terbuksi karena luasnya wilayah Toraja Bagian Barat yang mengakibatkan penguatan terhadap potensi – potensi fiskal dapat menunjang PAD toraja bagian barat.

Namun dengan adanya Moratorium tersebut panitia pemekaran kabupaten toraja barat tetap melengkapi persyaratan-persyaratan untuk pemekaran kabupaten yang dimana untuk kabupaten/ kota, syarat administratif yang harus juga dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri, untuk saat ini isu pemekaran toraja barat sudah berada pada tahap menunggu hasil dari DPRD provinsi dan Gubernur dan selanjutnya rekomendasi dari menteri dalam negeri selanjutnya, sebelum dibahas dan diputuskan bersama oleh DPR-RI dan Pemerintah, berkas usulan dibahas oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan diperiksa kelayakan syarat teknisnya

oleh Departemen Dalam Negeri berdasarkan berbagai indikator sebagai persyaratan pemekaran daerah. Persyaratan tersebut antara lain berkaitan dengan potensi SDA, ekonomi, sosial, budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Terakhir, syarat fisik yang dimaksud harus meliputi paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembuatan kota, lokasi calon Ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Isu pemekaran kabupaten toraja barat dilatarbelakangi oleh kesenjangan yang terjadi antara kabupaten induk dan toraja bagian barat di lihat dari 8 kecamatan yang bergabung mulai dari Bonggakaradeng, Simbuang, Mappak, Saluputti, Bittuang, Rembon, Masanda Dan Malimbong Balepe, kesenjangan tersebut seperti infrastruktur jalan, sekolah serta rumah sakit, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang kesejahteraan Masyarakat. Pandangan jika anggaran harus tetap berada dalam satu wilayah administrasi, kesenjangan yang kemudian memicu terbentuknya aksi kolektif masyarakat untuk mencari solusi melalui gagasan pemekaran Kabupaten Toraja Barat, sehingga terbentuknya panitia pemekaran kabupaten toraja barat sebagai tuntutan pada kabupaten induk agar toraja bagian barat dapat segera dimekarkan sehingga dapat mengurus sendiri daerahnya, yang dimana adanya dana dari pusat ditambah dengan PAD Toraja barat harapannya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sangat dibutuhkan Masyarakat Toraja barat.

Munculnya Kesenjangan yang terjadi antara kabupaten induk dan toraja bagian barat yang mendorong Masyarakat Toraja bagian Barat untuk ingin membangun sendiri daerahnya. Mulai dari pendidikan dan tenaga pendidik yang sangat kurang dikarenakan infrastruktur yang kurang memadai, hal ini dilihat dari kecamatan-kecamatan yang berada di bagian pegunungan dan perbatasan, seperti Bonggakaradeng, Simbuang, dan Mappak, yang secara historis memiliki tantangan geografis yang lebih berat dibandingkan wilayah pusat kabupaten, sulitnya akses dan minimnya sarana membuat tenaga pengajar, terutama guru-guru PNS, enggan ditempatkan di desa-desa terpencil. Akibatnya, kualitas pengajaran dan rasio guru-murid di wilayah barat seringkali lebih rendah, dapat dilihat dari FILM SOLATA, yang bercerita terkait pendidikan dan fasilitas sekolah (destiara anggita putri, 2025), Bukan hanya itu dilihat dari fasilitas Kesehatan khususnya Rumah Sakit Umum, tidak terdapat pada Toraja Bagian barat, dapat kita lihat contoh pada hari Sabtu 11/5/2024 adanya peristiwa ibu (maru') melahirkan di jalan, awalnya mereka datang ke puskesmas yang ada di lakke' (simbuang) namun perawat mengatakan Ibu maru' tidak bisa melahirkan normal dan harus segera dirujuk ke Rumah sakit yang ada di kota, jarak tempuh ke kota 15 Km naik motor di tambah lagi jalan yang sangat rusak yang mengakibatkan keterpaksaan untuk melahirkan di jalan, sayangnya bayi ibu maru' tidak bisa diselamatkan. (Rachmawati, 2024), hal ini yang dapat memicu terbentuknya solidaritas kelompok dalam panitia pemekaran karena adanya jiwa kemanusiaan, yang tidak ingin terulang Kembali. Bukan hanya itu toraja bagian barat lebih signifikan terkena bencana alam tanah longsor dilihat dari kondisi geografisnya

yang berbukit dan berlereng curam, olehnya itu perlu perhatian khusus oleh pemerintah, dapat kita lihat pada peristiwa yang terjadi di Desa Palangka, Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel) dinyatakan berakhir setelah 20 korban meninggal dunia dan 5 selamat yang berhasil ditemukan oleh Tim SAR gabungan (Tim/mir/dal, 2024)

Ketimpangan lainnya khususnya fasilitas layanan publik, seperti Kantor Pos, dan koperasi memerlukan perhatian serius di Kabupaten Tana Toraja. Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan hambatan besar bagi penduduk dalam mengirim dan menerima surat, paket, atau dokumen penting serta tempat untuk membeli bahan serta barang dengan harga yang relatif murah dibandingkan toko lainnya. Dampaknya, masyarakat di wilayah barat terisolasi dari layanan logistik yang efisien, membuat mereka harus menempuh jarak jauh dan mengeluarkan biaya lebih besar hanya untuk mengakses hak layanan pos, serta untuk membeli kebutuhan primer mereka. ketidaktersediaan fasilitas Kantor Pos dan koperasi di Toraja Barat adalah cermin dari kesenjangan pembangunan yang harus segera diatasi. Perhatian khusus terhadap peningkatan layanan ini akan mempermudah masyarakat dalam urusan komunikasi, transaksi keuangan, hingga pengembangan ekonomi (gun, 2024)

Karena adanya kesenjangan yang terjadi di wilayah Toraja Bagian Barat, mulai dari infrastruktur, fasilitas Kesehatan, Kantor pos, banyaknya bencana alam, ruang sekolah, koperasi aktif, yang kurang diperhatikan oleh pemerintah kabupaten di induk hal ini yang menjadi latar belakang terbentuknya Aksi Kolektif Masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat Bagaimana Aksi kolektif panitia pemekaran kabupaten toraja barat terkait isu pemekaran Kabupaten Toraja Barat yang didorong oleh kesenjangan yang terjadi antara kabupaten induk dan Toraja bagian barat yang kurang diperhatikan oleh kabupaten induk hal ini bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat toraja bagian barat, yang berawal dari tuntutan Masyarakat sehingga munculnya aksi kolektif Masyarakat toraja barat yang ditandai dengan dengan pembentukan panitia pemekaran yang berlangsung pada 2003 yang diketuai oleh (bapak Alm. El sombolinggi), selanjutnya pada 2013 yang diketuai oleh (bapak Alm. Ir. madao) dan 2022-sekarang diketuai oleh (bapak Drs, Yusuf sura' Tandirerung) isu pemekaran ini lebih nyata pada tahun 2022 dengan terbitnya SK panitia pembentukan daerah otonomi baru kabupaten toraja barat di makale tahun 2022, selama 2 periode yang telah dilalui, masih belum ada harapan yang terjadi pada pemekaran kabupaten toraja barat, Namun pada 2022 sudah sedikit melihat harapan-harapan yang terjadi mulai dari bulan September 2024 DPRD Tana Toraja resmi Menyetujui usulan Pemekaran kabupaten toraja barat pada sidang paripurna, dan pada tahun 2025 Bupati tana toraja menerbitkan sk (No. 268/ VII / Tahun 2025) terkait persetujuan Pembentukan CDOB kabupaten Toraja Barat Tertanggal 11 juli 2025.

Jumlah penduduk pada Toraja bagian barat sekitar 86.231 ribu jiwa, hal ini membuat Masyarakat ingin mengelola sendiri wilayahnya. Toraja bagian barat

memiliki banyak potensi mulai dari sektor perkebunan, peternakan, pertanian, serta panorama alam, sehingga pada 2024 Toraja bagian barat menyumbangkan sekitar 31-52 % pendapatan asli daerah (PAD) ke Kabupaten Induk berupa produk Perkebunan serta pertanian, (kopi dan kakao), dengan tingginya PAD yang disetor kepada Toraja Induk Toraja, Tidak hanya itu barat pun memiliki panas bumi yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga Panas bumi yang berada pada ketinggian 1.269 mdpl yang temperatur antara 37-97°C, Serta geothermal di kecamatan Bittuang, yang apabila dikelola dengan baik dapat menunjang kehidupan Masyarakat di toraja bagian barat. (Soetoyo, Kasbani, 2009). Oleh karena itu Masyarakat melakukan Aksi Kolektif untuk mencapai tujuan bersama yaitu pemekaran kabupaten Toraja Barat, yang berujung pada Gerakan Sosial, hal ini berangkat dari aspirasi Masyarakat, yang merasakan kesenjangan olehnya itu terbentuk solidaritas dalam interaksi yang berkelanjutan, dengan adanya identitas kelompok akan kesamaan kepentingan yang mengubah tuntutan menjadi Aksi kolektif yang berujung pada pembentukan gerakan sosial yang bertujuan pada Pemekaran kabupaten toraja barat yang dapat menghasilkan peluang politik seperti munculnya aktor politik, adanya jabatan serta adanya pendapatan yang dapat memobilisasikan sumber daya, agar kesenjangan tersebut dapat diminimalisir. (Tarrow Sidney, 1997. 23–24)

I.1 Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar terbentuknya aksi kolektif dalam isu pemekaran kabupaten toraja barat?
2. Apa saja bentuk aksi kolektif yang dilakukan dalam memperjuangkan isu pemekaran kabupaten toraja barat?

I.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui yang menjadi dasar terbentuknya aksi kolektif dalam isu pemekaran kabupaten toraja barat.
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk aksi kolektif yang dalam memperjuangkan isu pemekaran kabupaten toraja barat.

I.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan berguna dan mempunyai beberapa dampak yakni sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini akan memperkaya literatur akademis dalam bidang Politik serta sosial dalam studi kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pemekaran kabupaten, serta aksi kolektif dan gerakan sosial masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada topik serupa.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana pemekaran kabupaten mempengaruhi oleh tuntutan yang menghasilkan aksi kolektif dan gerakan sosial Masyarakat Informasi ini dapat digunakan untuk menjadi analisis bagi daerah yang ingin memekarkan diri melalui perjuangan panitia pemekaran yang bertujuan untuk menjaga kestabilan pembangunan daerah yang berkelanjutan

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian (Riyanto & Kovalenko, 2023) menulis penelitian dalam jurnalnya yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama" penelitian ini membahas tentang pentingnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan negara kesejahteraan, dengan pendekatan teori-teori demokrasi partisipatif, teori kekuasaan, teori keterlibatan masyarakat, dan teori aksi kolektif, berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan sosial publik, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam partisipasi tersebut, jurnal meliputi peran masyarakat dalam program sosial seperti jaring pengaman sosial, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi yang merupakan aksi kolektif dalam Masyarakat melalui interaksi masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai program kesejahteraan sosial, seperti verifikasi data penerima bantuan sosial, pelatihan keterampilan, pendirian koperasi, dukungan dalam mitigasi risiko bencana, dan lain sebagainya, hasil akhir dari penelitian ini bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk efektivitas dan keberhasilan program kesejahteraan sosial. Namun, ada kendala seperti keterbatasan sumber daya dan dukungan pemerintah yang harus diatasi dengan memperkuat koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah perlu memberikan ruang luas dan pelatihan partisipasi kepada masyarakat untuk mendorong keterlibatan aktif demi kesejahteraan bersama.

Penelitian Riyanto dan Kovalenko mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis berupa adanya aksi kolektif dan gerakan sosial yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan publik, dan program sosial yang berpengaruh pada kehidupan mereka. yang harapannya dapat mensejahterakan Masyarakat, namun perbedaan dari penelitian ini fokus menggunakan teori demokrasi partisipatif, teori kekuasaan, teori keterlibatan masyarakat, dan teori aksi kolektif, sedangkan penelitian penulis mengaitkan antara gerakan Sosial dan Aksi kolektif yang dimana adanya solidaritas yang terbangun untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam penelitian (Harsasto, 2020) menulis penelitian dalam jurnalnya yang berjudul "Membedah Diskursus Modal Sosial dan Gerakan Sosial Kasus Penolakan Pabrik Semen di Desa Maitan, Kabupaten Pati" penelitian ini membahas tentang

membahas tentang gerakan sosial penolakan pembangunan pabrik semen di Desa Maitan, Pati. Masyarakat desa bersama jaringan masyarakat peduli lingkungan melakukan perlawanan kolektif untuk melindungi hak dan lingkungan mereka dari dampak negatif pabrik semen. Gerakan ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, dari petani sampai tokoh lokal dan aktivis lingkungan, yang bekerja melalui jejaring sosial horizontal dan vertikal, Teori utama yang digunakan, teori modal sosial, yang terdiri atas modal sosial bonding (hubungan horizontal antar anggota masyarakat), bridging (jejaring antara kelompok berbeda), dan linking (hubungan vertikal antara masyarakat dan pejabat), hasil akhir dari penelitian ini bahwa Gerakan sosial ini sukses menggalang dukungan luas, menggunakan berbagai strategi seperti protes, penghalangan proses AMDAL, litigasi, advokasi publik, dan media sosial, Meskipun berhasil memenangkan keputusan serius di pengadilan tingkat pertama (PTUN Semarang) yang membatalkan izin lingkungan pabrik semen, kemenangan ini terbatas karena keputusan banding janji hasil tersebut. Gerakan ini memperkuat rasa solidaritas, saling percaya, dan norma partisipasi dalam masyarakat, namun juga menghadapi tantangan besar dari tekanan politik dan keterlibatan dalam gerakan politik lain yang mencakup solidaritas olehnya itu gerakan sosial yang dibangun di atas modal sosial yang kuat dapat menjadi alat efektif dalam menghadapi pelanggaran hak warga dan kerusakan

Penelitian Harsasto mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis berupa adanya aksi kolektif yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, yang memanfaatkan strategi seperti protes, penghalangan proses AMDAL, litigasi, advokasi publik, dan media sosial sebagai strategi dalam Solidaritas bersama, gerakan ini memperkuat solidaritas, saling percaya, dan norma partisipasi dalam Masyarakat namun adanya tekanan politik sehingga terlibat dalam gerakan politik yang menyebabkan terganggunya kepercayaan dan solidaritas antar peserta. Namun perbedaan dari penelitian ini fokus menggunakan teori modal sosial, modal sosial bonding (hubungan horizontal antar anggota masyarakat), bridging (jejaring antara kelompok berbeda), dan linking (hubungan vertikal antara masyarakat dan pejabat), sedangkan penelitian penulis menggunakan teori Gerakan sosial, Aksi kolektif yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang dimana adanya solidaritas yang terbangun untuk mencapai tujuan bersama tanpa adanya kepentingan perseorangan.

Di sisi lain penelitian (da Costa et al., 2023) menulis penelitian dalam jurnalnya yang berjudul "*Social movements and collective behavior: an integration of meta-analysis and systematic review of social psychology studies*" penelitian ini membahas tentang membahas tentang gerakan sosial di bidang psikologi sosial mengenai Gerakan Sosial dan Perilaku Kolektif, Gerakan ini berfokus untuk melihat pola-pola perilaku kolektif dalam penguatan partisipasi dalam Gerakan sosial dan menganalisis efek psikologis jangka Panjang dari partisipasi Gerakan tersebut, metode yang digunakan Melakukan pencarian sistematis di berbagai basis data utama (*Web of Science, Scopus, ProQuest, ScienceDirect, dll.*) untuk artikel yang diterbitkan antara tahun 1969 hingga 2022, teori yang digunakan berupa Model

Identitas Sosial Aksi Kolektif, Teori Aksi Kolektif Rasional, Teori Struktur Peluang Politik, hasil akhir dari penelitian ini merupakan integrasi meta-analisis dan tinjauan sistematis yang terkait mengenai faktor-faktor psikososial yang paling kuat mendorong partisipasi dalam gerakan sosial dan perilaku kolektif, serta dampak jangka panjangnya.

Penelitian da costa et.al mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis berupa adanya aksi kolektif yang dilakukan untuk menemukan yang menunjukkan bahwa sebagian besar partisipasi kolektif terjadi seperti ritual keagamaan, dan pertemuan sosial. Partisipasi kolektif sangat dipengaruhi oleh identitas sosial, efikasi kolektif, keadilan relatif, norma moral dan keyakinan politik, Aksi kolektif berhasil apabila didukung oleh identitas kolektif yang kuat dan rasa harapan, adanya Emosi kolektif dan keyakinan moral berperan penting untuk mendorong aksi. Namun perbedaan dari penelitian ini fokus yang digunakan dalam aspek psikologi sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada aspek sosial serta politik.

Selanjutnya dalam penelitian (Endo, 2024), menulis penelitian dalam jurnalnya yang berjudul "*Structural Change Through Collective Action as Democratic Practice Linking Grassroots Democracy With Social Justice*" penelitian ini membahas tentang bagaimana aksi kolektif sebagai praktik demokrasi dapat mengubah struktur masyarakat dan membawa keadilan sosial, dengan menekankan pentingnya demokrasi akar rumput dan institusi yang dibangun dari bawah untuk melawan penindasan dan dominasi, berfokus pada gagasan Iris Marion Young tentang tanggung jawab kolektif untuk mengatasi ketidakadilan struktural, dalam penelitian ini mengembangkan pemikiran dengan menawarkan konsep praktik demokrasi, di mana warga berperan aktif membangun institusi demokratis dari bawah, bukan hanya menekan agen-agen yang berkuasa, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tentang aksi kolektif untuk perubahan struktural dan menyoroti pentingnya demokratisasi pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari melalui contoh koperasi pekerja sebagai bentuk konkret aksi kolektif demokratis, dalam jurnal ini menggunakan pendekatan teoritis dan kajian literatur kritis untuk membedah dan memperluas teori Young, dengan menganalisis berbagai literatur filosofis dan empiris tentang aksi kolektif, keadilan struktural, dan demokrasi praksis, serta membandingkan beragam model tanggung jawab dan perubahan sosial. Teori yang digunakan seperti *Social Connection Model* dari Iris Marion Young tentang tanggung jawab politik kolektif untuk mengatasi ketidakadilan yang dihasilkan oleh struktur sosial, *Relational Conception of Justice* yang fokus pada relasi kekuasaan dan pengambilan keputusan daripada distribusi ekonomi semata, dan *Cooperative democracy* dan konsep demokrasi partisipatif untuk menekankan pelaksanaan demokrasi dalam aktivitas sosial dan ekonomi sehari-hari.

Penelitian Endo mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis berupa adanya aksi kolektif serta gerakan sosial yang dilakukan yang berfokus pada ketidakadilan yang menunjukkan adanya aksi kolektif yang mengarah pada gerakan sosial yang bertujuan untuk perubahan pentingnya demokratisasi pengambilan

keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Namun perbedaan dari penelitian ini fokus pada mengkritisi perluasan teori iris marion young sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada teori Sidney Tarrow terkait Gerakan sosial dan Aksi kolektif.

1.6 Konsep dan Teori

1. Konsep Pemekaran

Pemekaran wilayah (propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif cukup luas. Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan. Pemekaran daerah adalah proses pembentukan daerah otonom baru (DOB) dengan maksud memperluas keadilan administrasi daerah atas wilayahnya sendiri melalui pembentukan kabupaten/kota baru, provinsi baru, atau unit administrasi sejenis. Proses ini diatur secara hukum melalui kerangka peraturan dan regulasi yang mengarahkan persyaratan teknis, administratif, serta tata cara pembentukan DOB. Hal ini dijelaskan sebagai bagian dari dinamika desentralisasi di Indonesia pasca reformasi. Wacana pemekaran adalah wacana publik lokal yang terbuka dan partisipatif, Saat ini wacana desentralisasi Indonesia bahkan hampir didominasi oleh wacana pembentukan daerah baru.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah. Sedangkan secara substansi, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pemekaran daerah dijelaskan sebagai upaya merealisasikan desentralisasi dengan tujuan utama untuk pemeratakan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mencapai kesejahteraan Masyarakat, yang lahir sebagai respons terhadap berbagai motif sosiologis, politis, dan ekonomis hanya layak dilakukan jika orientasinya benar-benar berlandaskan kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan administratif atau elite politik. (Seldadyo et al., 2009)

mewujudkan keserasian pembangunan antar pusat dan daerah. Selain itu diatas, pemekaran daerah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal untuk sesuai potensi dan cita-cita daerah. Gagasan pemekaran wilayah dan pembentukan Daerah Otonom Baru memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Secara yuridis landasan yang memuat persoalan pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah

Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang pembentukan daerah dalam suatu NKRI, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Dari sisi pemerintah pusat, proses pembahasan pemekaran wilayah yang datang dari berbagai daerah melalui dua tahapan besar yaitu proses teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta proses politik karena selain harus memenuhi persyaratan teknokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, proposal pemekaran harus didukung secara politis oleh DPR.

Konsep di dari aspirasi pembentukan daerah baru memang dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Di suatu daerah suatu faktor dapat lebih menonjol daripada di daerah lain, sedangkan di lokasi yang lain keadaan yang sebaliknya mungkin terjadi, motif ini dorongan yang melatarbelakangi terjadinya pembentukan daerah otonom baru dari wilayah induk Namun demikian, pemekaran tampaknya bukan fenomena yang bersifat acak, karena ada beberapa gejala sistematis yang dapat digeneralisasi. Gejala ini dapat dikategorisasi ke dalam tiga kondisi (sosial, ekonomi, dan politik)

a) Kondisi Sosial

Dorongan identitas daerah, upaya mencapai homogenitas wilayah (misalnya berdasarkan etnis, bahasa, atau budaya), serta respons terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah. konsep ini menekankan bagaimana keinginan untuk hidup dalam komunitas yang lebih terorganisasi secara teritorial dapat memicu terbentuknya hal-hal baru, keinginan masyarakat yang merasa kurang terwakili atau kurang diakomodasi identitasnya dalam wilayah induk untuk membentuk daerah baru yang lebih "homogen" tidak adanya ketimpangan yang terjadi, hal ini menjadi latar belakang munculnya tuntutan dari masyarakat karena adanya kesenjangan yang terjadi dalam hal infrastruktur.

b) Kondisi Ekonomi

Potensi insentif fiskal (misalnya alokasi DAU dan mekanisme transfer lainnya), peningkatan kapasitas fiskal daerah baru, serta peluang ekonomi lokal, berkaitan dengan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi potensi ekonomi lokal adanya Akses yang lebih besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), memperbaiki distribusi sumber daya, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), hal ini menjadi harapan bahwa daerah baru dapat mengelola sumber daya alam dan investasi secara mandiri, mempercepat pertumbuhan

ekonomi, serta melakukan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih efisien. Dalam kenyataannya, kondisi ekonomi seringkali beriringan dengan kondisi lain, seperti politik dan sosial, dan bisa menjadi penentu utama keputusan pemekaran di berbagai daerah di Indonesia.

c) Kondisi Politik

Alasan-alasan yang bersifat politis di balik terjadinya pemekaran daerah, terutama terkait dengan perebutan kekuasaan, jabatan, dan kepentingan elite lokal maupun pusat. Kondisi ini mencakup dorongan untuk memperluas pengaruh politik, membuka peluang jabatan eksekutif dan legislatif baru, memperbesar konstituensi, serta menguatkan posisi tawar elite politik dalam pemerintahan daerah dan hubungan dengan pemerintah pusat. Seringkali melibatkan kalkulasi kepentingan partai politik, persaingan antar elite, dan strategi untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya negara dan keuntungan ekonomi yang melekat pada jabatan politik daerah pemekaran. Dalam banyak kasus di Indonesia, kondisi politik menjadi salah satu faktor dominan dalam proses pembentukan daerah baru.

2. Kesejahteraan Rakyat

Dilihat melalui dampak pemekaran terhadap indikator-indikator pembangunan dasar seperti IPM, akses layanan kesehatan, kualitas pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah baru maupun wilayah lama yang terdampak, tujuan utama dari kebijakan pemekaran daerah, yaitu pemerintah berharap dengan terbentuknya daerah otonom baru dapat terjadi pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan perbaikan hidup Masyarakat

Namun pemekaran tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan, Hasilnya bisa bervariasi antar daerah dan bergantung pada bagaimana proses pemekaran didukung oleh perencanaan, kapasitas kelembagaan, dan kebijakan pendampingan pasca pembentukan. Pemekaran dapat meningkatkan akses layanan publik dan perhatian fiskal ke daerah baru, namun manfaat jangka panjang terhadap kesejahteraan tidak selalu lebih baik dibandingkan daerah yang tidak dimekarkan, terutama jika kapasitas administrasi dan sumber daya publik tidak memadai. IPM, partisipasi pendidikan, cakupan pelayanan kesehatan, kualitas infrastruktur, dan kinerja fiskal daerah menjadi fokus utama untuk menilai dampak pemekaran. Olehnya itu pemekaran bukanlah langkah efektif untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas dan menyarankan alternatif kebijakan seperti pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan secara langsung, kerjasama antardaerah, serta penguatan teknokrasi pembangunan sebagai cara yang lebih tepat untuk mewujudkan kesejahteraan (Seldadyo et al., 2009, p. 49)

a) Pendidikan

Pendidikan secara umum mutu pembangunan manusia, lama sekolah (*schooling year*) dan partisipasi sekolah menghasilkan social returns yang tinggi. Investasi di bidang ini, dalam jangka menengah dan panjang, penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sebagai salah satu fungsi kesejahteraan yang dibawa oleh desentralisasi. Pemekaran wilayah sering dijelaskan dari dampaknya terhadap akses, kualitas, dan pemerataan layanan pendidikan di wilayah yang dimekarkan maupun yang terdampak. Pendidikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, mendorong produktivitas, lalu memperbaiki kesejahteraan. Jadi, tantangan terbesar bagi pemerintah di berbagai tingkat dan bagaimana sebanyak mungkin mengirimkan anak-anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Tingkat partisipasi sekolah bisa dijadikan petunjuk untuk hal itu, dan karenanya determinan penentu partisipasi sekolah menjadi penting untuk ditelaah, langkah yang efektif untuk memperbaiki mutu pendidikan sebab banyak daerah pemekaran belum mampu mengimbangi daerah induk atau daerah non-pemekaran dalam aspek lama pendidikan, prestasi siswa, dan partisipasi sekolah. Solusi yang ditawarkan adalah perbaikan kebijakan berbasis data, peningkatan kapasitas fiskal, serta pembangunan sekolah yang mempertimbangkan faktor geografi dan kebutuhan lokal (Seldadyo et al., 2009, p. 49)

b) Kesehatan

Pemekaran dianggap dapat memperluas akses ke fasilitas kesehatan (puskesmas, poliklinik, Rumah Sakit daerah) dengan mencetuskan peluang baru yang lebih dekat secara geografis dengan warga. Kesehatan adalah rahmat terpenting dalam kehidupan manusia, Kesehatan menopang produktivitas, lalu menghela kesejahteraan ke titik yang lebih tinggi, hingga akhirnya ia memperbaiki mutu kehidupan. Sama seperti pendidikan, kesehatan juga merupakan investasi berharga jangka menengah-panjang. Ketersediaan dan distribusi pusat layanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu), yang dinilai per kilometer persegi untuk memastikan akses seimbang di wilayah yang luas atau terpencil (Seldadyo et al., 2009, p. 52)

c) Infrastruktur

Infrastruktur (fisik dan sosial) sebagai prasyarat dan indikator kunci keberhasilan pemekaran. Tanpa infrastruktur yang memadai, pembentukan daerah baru sulit menghadirkan layanan publik yang efektif dan efisien. Infrastruktur meliputi fasilitas pemerintahan, jaringan transportasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta sistem distribusi

layanan yang diperlukan untuk operasional pemerintahan daerah yang otonom, Pemekaran biasanya membawa beban fiskal tambahan karena harus membangun infrastruktur pemerintahan baru serta fasilitas publik. Tanpa sumber daya yang cukup, inisiatif infrastruktur tidak dapat berkelanjutan dan tidak berimbang terhadap kebutuhan layanan publik. Oleh karena itu, beberapa penelitian menekankan pentingnya perencanaan fiskal yang matang dan evaluasi dampak biaya sebelum atau segera setelah pembentukan DOB, infrastruktur adalah penopang vital aktivitas ekonomi dan sosial. Jalan raya adalah salah satu indikator yang bisa dipakai untuk melihat bagaimana aktivitas ekonomi dan sosial itu ditopang. (Seldadyo et al., 2009, p. 52)

3. Teori Aksi kolektif

Aksi kolektif adalah tindakan bersama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak bisa dicapai secara individual, terutama ketika mereka menghadapi hambatan dari pihak berkuasa atau kelompok lain, artinya aksi kolektif ini merupakan salah satu cara agar dapat mencapai tujuan bersama fokus utama aksi kolektif adalah tujuan bersama, seperti perubahan kebijakan, keadilan sosial, atau perbaikan pelayanan publik.

Dalam aksi kolektif berasal dari 3 karakteristik yaitu tantangan, ketidakpastian dan solidaritas, tantangan terhadap otoritas mengecam dengan biaya yang tidak diketahui dan meledak dalam bentuk-bentuk sehingga seringkali tidak terkendali hal ini yang dapat memicu aksi kolektif tidak bertahan lama, dalam ketidakpastian dalam aksi kolektif, hal ini merujuk pada situasi ketika individu atau kelompok yang hendak melakukan aksi kolektif menghadapi keraguan, risiko, atau tidak adanya jaminan hasil atas partisipasi mereka, hal ini merupakan ciri khas dari aksi kolektif karena perubahan sosial selalu bergantung pada banyak variabel yang sulit diprediksi. Oleh karena itu, solidaritas, jaringan sosial yang kuat, serta kepemimpinan yang jelas sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian dan mendorong keberhasilan mobilisasi aksi, solidaritas merupakan kekuatan berasal dari suatu tuntutan yang bertujuan positif yang memotivasi bergabung dengan dalam aksi kolektif.

Landasan munculnya aksi kolektif guna untuk menampung aspirasi dan memobilisasi kesenjangan yang terjadi, hal ini yang dapat dilakukan masyarakat toraja bagian barat untuk bisa berbicara langsung kepada pemerintah dan suara mereka dapat didengar. Dalam Tindakan kolektif merupakan inti dari semua Gerakan sosial yaitu Pemekaran Kabupaten Toraja Barat, berbeda dengan aksi kolektif yang dimana aksi kolektif dapat mengambil berbagai bentuk dapat singkat dan berkelanjutan, institusional atau disruptif, monoton atau dramatis Sebagian besar terjadi dalam kerangka institusi oleh kelompok-kelompok yang berbentuk yang bertindak atas nama tuntutan, artinya orang-orang yang berusaha agar Tujuan dari aksi kolektif bisa tercapai, Aksi kolektif menjadi sarana utama bagi kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak, kepentingan, dan perubahan

sosial melalui kekuatan solidaritas dan kerjasama. Hal ini yang merupakan kunci dari aksi kolektif (Tarrow Sidney, 1997, pp. 33, 41,47)

Faktor- Faktor Pembentuk Aksi Kolektif

a) Kesenjangan

Adalah sebagai bagian dari konteks struktural yang mendorong aksi kolektif dilihat dari perbedaan nyata tingkat pembangunan dan kesejahteraan antara satu wilayah dengan wilayah lain, terutama antara daerah yang akan dimekarkan dan daerah induknya. Kesenjangan ini ini tampak dari jarak capaian indikator pembangunan seperti pendapatan, akses layanan dasar, dan kualitas infrastruktur yang menunjukkan bahwa satu wilayah tertinggal dibanding wilayah lain, kesenjangan dalam pemekaran biasanya diukur secara kuantitatif dengan berbagai indikator, seperti PDRB per kapita, indeks Williamson, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, atau ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pengukuran ini dipakai untuk menunjukkan bahwa kesenjangan yang terjadi bukan sekadar persepsi, tetapi dapat dibuktikan lewat data statistik yang konsisten antarwilayah.(Tarrow Sidney, 1997, pp. 327–330)

b) Identitas kelompok

Adalah Rasa kesadaran diri kolektif yang menyatukan masyarakat melalui nilai bersama, pengalaman operasi dan simbol budaya, sehingga memperkuat solidaritas untuk bertindak demi kepentingan bersama, identitas ini bukan statis artinya dibangun dinamis yang mengelompokkan “kami” dan “mereka” hal ini terbentuk karena adanya tujuan bersama, hal ini berfungsi sebagai perekat antar sesama yang membangun kesolidaritasan mereka. bagian dari identitas sosial yang muncul ketika individu mendefinisikan dirinya sebagai anggota suatu kelompok dan merasa terikat secara emosional dengan kelompok tersebut. Seseorang tidak lagi hanya melihat diri sebagai “saya”, tetapi juga sebagai “kami” bersama orang lain yang dianggap satu kelompok, misalnya berdasarkan asal daerah, etnis, profesi, agama, atau organisasi, Dalam konteks aksi kolektif isu pemekaran wilayah, identitas kelompok menjadi landasan solidaritas dan dasar klaim politik. Warga yang merasa sebagai satu komunitas (“kami orang Toraja Barat”, “kami wilayah pinggiran”) lebih mudah dimobilisasi untuk bersama-sama menuntut pengakuan, keadilan, dan perubahan kebijakan, karena mereka melihat masalah bukan sekadar menimpa individu, tetapi menimpa “kelompok kami” (Tarrow Sidney, 1997, pp. 21–25)

c) Peluang politik (*political opportunities*)

Dalam peluang politik merupakan faktor eksternal dalam struktur politik yang mempengaruhi kemunculan, perkembangan, dan keberhasilan aksi kolektif. Peluang ini mencakup keterbukaan akses institusi, instabilitas elit, sekutu potensial, dan penurunan represi negara, yang mendorong aktor untuk bertindak kolektif, struktur peluang politik adalah dimensi-dimensi relatif stabil (meski tidak selalu formal) dari lingkungan politik yang mendorong atau menghambat aksi kolektif, dan merupakan sumber daya eksternal yang dapat dimanfaatkan bahkan oleh kelompok yang lemah. Kondisi atau situasi dalam lingkungan politik yang membuka ruang bagi kelompok untuk bertindak dan punya peluang lebih besar untuk berhasil mempengaruhi kebijakan atau kekuasaan. Istilah ini menekankan bahwa keberhasilan aksi kolektif tidak hanya bergantung pada kemarahan dan organisasi, tetapi juga pada seberapa “terbuka” atau “rapuh” sistem politik pada saat tertentu, derajat keterbukaan sistem politik terhadap partisipasi, adanya perpecahan atau konflik di antara elite, kehadiran lembaga negara, dan tingkat kapasitas serta kemauan negara untuk melakukan represi. Ketika pintu akses lebih terbuka, elite terbelah, ada aktor dalam negara yang mau membantu, dan represi melemah, hal ini biasanya lebih berani memobilisasi aksi. Dalam praktik, peneliti sering berbicara tentang “struktur peluang politik” untuk menekankan bahwa peluang itu bukan satu faktor tunggal, tetapi konfigurasi beberapa dimensi politik yang membentuk konteks bagi gerakan. Struktur inilah yang kemudian memengaruhi kapan gerakan muncul, strategi apa yang dipilih (misalnya lobi, demonstrasi, litigasi), dan seberapa jauh peluang keberhasilannya dalam jangka pendek maupun Panjang (Tarrow Sidney, 1997, pp. 48–51)

d) Mobilisasi sumber daya

Adalah proses mengumpulkan, mengorganisir, dan menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki atau dapat diakses oleh individu/kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya dalam aksi kolektif., keberhasilan Aksi sangat bergantung pada kemampuan aktor-aktornya untuk memperoleh dan mengelola sumber daya seperti waktu, uang, jaringan, dan keterampilan secara efektif, bukan hanya pada besarnya rasa ketidakpuasan. Dalam praktik, mobilisasi sumber daya mencakup aktivitas seperti rekrutmen anggota, penggalangan dana, pembentukan aliansi, pengelolaan relawan, pengaturan kampanye media, hingga manajemen informasi dan strategi aksi di lapangan. Adanya strategi unit atau mekanisme khusus untuk memastikan sumber daya terkumpul, didistribusikan, dan dipakai secara efisien sehingga aksi bisa berulang dan berkelanjutan. (Tarrow Sidney, 1997, pp. 320–330)

4. Teori Gerakan Sosial

Dalam sebuah pemekaran adanya gerakan sosial, gerakan sosial tersendiri merupakan suatu gerakan untuk mencapai tujuan bersama, olehnya itu gerakan sosial perlu adanya aksi kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menuntut perubahan untuk menentang kebijakan, struktur kekuasaan atau norma sosial yang tidak sesuai dengan UUD, dalam teori ini dikaitkan dengan aksi kolektif yang dilakukan dalam isu pemekaran kabupaten toraja barat, adanya isu pemekaran kabupaten toraja barat.

Kriteria lain untuk membuat klasifikasi gerakan sosial adalah dari Kornblum yang membedakan antara *Revolutionary Movement*, *Reformist Movement*, *Conservative Movement* dan *Reactionary Movement*. Dasar kriteria klasifikasi Kornblum ini menekankan pada aspek tujuan gerakan yang hendak dicapai. Pertama, jika gerakan sosial bertujuan mengubah institusi dan stratifikasi masyarakat, maka gerakan tersebut merupakan gerakan revolusioner (*revolutionary movement*). Revolusi sosial merupakan suatu transformasi menyeluruh tatanan sosial, termasuk di dalamnya institusi pemerintah dan sistem stratifikasi, Kedua, apabila gerakan sosial hanya bertujuan merubah sebagian institusi dan nilai, maka disebut gerakan reformis (*reformist movement*). Ketiga, gerakan yang berupaya mempertahankan nilai dan institusi masyarakat disebut gerakan konservatif (*conservative movement*). Kemudian keempat, suatu gerakan disebut gerakan reaksioner (*reactionary movement*) manakala tujuannya ialah untuk kembali ke institusi dan nilai di masa lampau dan meninggalkan institusi dan nilai masa kini.

Dalam isu pemekaran kabupaten toraja barat, termasuk kedalam *reformist movement* merupakan gerakan sosial yang hanya bertujuan merubah sebagian institusi dan nilai, artinya gerakan ini bertujuan melakukan perubahan pada sistem, kebijakan atau institusi yang dianggap tidak adil, atau menyimpang, upaya gerakan ini secara luas berupaya melakukan perbaikan terhadap bidang sosial, politik, ekonomi untuk mengembalikan ketatanan nilai yang lebih ideal.

Dalam pandangan Tourne (Sztompka, 2005), masyarakat dan sejarah diciptakan melalui tindakan kolektif dan agen utamanya adalah gerakan sosial. Wujud agen ini dipahami sebagai bentuk-bentuk mobilisasi kolektif yang secara langsung menyerang landasan struktural masyarakat. Gerakan sosial adalah aktor, karena realitas sejarah dibangun melalui konflik dan negosiasi gerakan sosial yang memberikan bentuk sosial khusus terhadap orientasi kultural.

Dalam Politik gerakan sosial diklasifikasikan sebagai suatu bentuk perilaku kolektif tertentu. Gerakan sosial ditandai oleh adanya tujuan dan kepentingan bersama. Sejumlah ahli menekankan pada segi kolektif dari gerakan sosial ini. Dalam pandangan Jary dan Jary gerakan sosial didefinisikan sebagai aliansi sejumlah besar orang yang berserikat untuk mendorong maupun menghambat suatu segi perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Mengingat,

keanekaragaman gerakan sosial sangat besar. Kesuksesan sebuah gerakan adalah bagaimana dominasi aktivitas peran kelompok (group) yang ada dalam gerakan sosial tersebut, Peran kelompok ini hanya dapat dianalisis melalui pola perilakunya atau perilaku kolektifnya.

Berawal dari pola perilaku kolektif inilah bagaimana perilaku kelompok berkembang menjadi kekuatan perubahan sosial. Secara garis besar terdapat dua perilaku kelompok yang paling umum untuk diketahui (Sunarto, 2004) yaitu pertama, perilaku kelompok yang cenderung berpedoman pada institusi yang ada dalam masyarakat, dan yang kedua, perilaku kelompok yang cenderung perilakunya tidak berpedoman pada institusi yang ada, jika di sebuah pemekaran hal ini menjadi pro dan kontra dari masyarakat, semakin besar ketegangan struktural, semakin besar pula peluang terjadinya perilaku kolektif.

Frame yang sama dibentuk oleh unifikasi perilaku mereka dalam ruang lingkup aktivitas pergerakan yang disebut sebagai perilaku kolektif. karena terdapat unsur perilaku kolektif sebagai ciri khas gerakan sosial maka terdapat kebersamaan tujuan dan kepentingan jangka panjang para anggota gerakan, yang berusaha mengubah ataupun mempertahankan masyarakat atau institusi yang ada di dalamnya. Pada akhirnya gerakan sosial mampu berperan sebagai agen perubahan karena didukung oleh kapasitas personal individu-individu yang tergabung dalam gerakan dalam memobilisasi kapasitas, kemampuan, kebutuhan, sikap dan kecenderungan potensialnya dalam melakukan berbagai jenis tindakan dalam pencapaian perubahan sosial yang dibangun. (Rizal A Hidayat, 2007).

Aksi kolektif dan gerakan sosial saling berkaitan yang dimana, aksi kolektif adalah Tindakan bersama oleh kelompok untuk mencapai tujuan bersama, dalam Gerakan sosial merupakan bentuk aksi kolektif yang berkelanjutan dan bertujuan untuk mengubah atau mempertahankan struktur sosial-politik, untuk mencapai tujuan bersama hal ini tidak dapat terpisahkan, namun dapat dipahami bahwa tidak semua aksi kolektif bisa menjadi gerakan sosial, sedangkan gerakan sosial sudah pasti mengandung aksi kolektif dikarenakan dalam gerakan sosial ini, memerlukan aksi kolektif untuk membangun solidaritas, sebagaimana dijelaskan oleh Tarrow, Tanpa aksi kolektif, tidak ada dinamika perlawanan yang membentuk gerakan. (Tarrow Sidney, 1997).

1.7 Penelitian terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL	FOKUS PENELITIAN	RELEVANSI PENELITIAN PENULIS
1	(Riyanto & Kovalenko, 2023)	Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama	Gerakan Sosial dalam Masyarakat, mengkaji bagaimana peran serta masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program sosial pemerintah	Adanya kesamaan Gerakan sosial yang dilakukan oleh Masyarakat, namun penelitian penulis berfokus pada teori Tarrow yang mengkaji isu-isu perubahan sosial berbasis protes yang didalamnya terikat kesolidaritasan.
2.	(Feronica Bormasa, 2023)	Solidaritas dalam Gerakan Sosial	memahami bagaimana jejaring sosial, kolaborasi masyarakat, serta aksi kolektif dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman lingkungan.	keterlibatan Masyarakat, solidaritas sosial memang menjadi dinamika kunci pembentuk aksi kolektif. Namun dalam penelitian ini melihat solidaritas dalam jangka Panjang dan berkesinambungan, sedangkan solidaritas yang penulis lihat dalam teori Sidney Tarrow dampak jangka pendek dari solidaritas apa bila tujuan sudah tercapai
3	(Harsasto, 2020)	Membedah Diskursus Modal Sosial dan Gerakan Sosial	memahami dinamika gerakan sosial petani di Desa Maitan, Kabupaten Pati, yang melakukan aksi kolektif menolak pembangunan pabrik semen, serta pentingnya modal sosial sebagai kekuatan pendorong solidaritas dan mobilisasi	melihat adanya aksi yang dilakukan, dan konsep solidaritas yang digunakan namun lebih berfokus pada Gerakan sosial barat, mobilisasi sumberdaya dan proses politik sedangkan penulis lebih berfokus pada aksi kolektif yang berasal dari tuntutan Masyarakat.

			perlawanan masyarakat	
4	(da Costa, da Costa, Silvia	Social movements and collective behavior: an integration of meta-analysis and systematic review of social psychology studies	pola perilaku kolektif dan gerakan sosial serta menguji faktor-faktor psikososial yang mempengaruhi partisipasi dalam aksi kolektif dan gerakan sosial	Adanya kesamaan penelitian yang melihat, tentang aksi kolektif gerakan sosial sebagai tantangan kolektif berdasarkan solidaritas tujuan bersama yang dilakukan secara berkesinambungan dalam interaksi dengan elit, lawan, dan otoritas, sedangkan dalam penelitian penulis lebih berfokus pada bidang psikologi sedangkan penulis melihat dari aspek sosial serta politik.
5	(Umar, Ibrahim)	Isu Strategis Komunikasi Politik di Kalangan Elite Daerah dalam Proses Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah	proses percepatan pemekaran, yang di bantu oleh forum pemekaran di bawah tanggung jawab elit, penelitian ini lebih fokus pada elit yang bertindak bukan terhadap Masyarakat langsung, sedangkan dalam penelitian penulis, Masyarakat yang langsung memelopori terjadinya isu pemekaran.	dalam penelitian penulis, Masyarakat yang langsung memelopori terjadinya isu pemekaran. Adanya kesamaan dalam penelitian terkait alasan munculnya isu pemekaran yaitu untuk pemerataan Pembangunan, namun dalam penelitian ini lebih berfokus pada peran aktor politik, sedangkan dalam penelitian penulis lebih melihat aksi kolektif dari sebuah pemekaran.

6	(Muqoyyidin, 2013)	Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan	Analisis proses pemekaran wilayah dari sisi kebijakan dan realisasinya, melihat latar belakang pemekaran wilayah terhadap pemerataan pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan Masyarakat, namun munculnya dominasi proses politik, dan munculnya konflik baik antar elit maupun antara masyarakat.	Adanya kesamaan dalam penelitian terkait alasan munculnya isu pemekaran yaitu untuk pemerataan Pembangunan, namun dalam penelitian ini lebih berfokus pada peran aktor politik, serta mobilisasi sumberdaya yang menghasilkan konflik, sedangkan dalam penelitian penulis lebih melihat aksi kolektif dari sebuah pemekaran.
7.	(RaisRais, Lukman	Analisis Konflik Politik Pasca Pembentukan Daerah Otonomi Baru	kebijakan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) yang diklaim dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan, namun pada prakteknya seringkali justru menjadi pemicu konflik politik, sosial, dan ekonomi di tingkat lokal, prosesnya didominasi oleh kepentingan politis dan belum menciptakan perubahan.	untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat, adanya Gerakan sosial yang terjadi namun terkait konflik memanfaatkan peluang politik dalam perubahan institusional, polarisasi sosial, dan pertarungan kekuasaan, sedangkan penelitian peneliti lebih fokus terkait aksi kolektif dan rasa kesolidaritasan adanya Ruang tata
8	(Yonnawati, 2016)	Rekonstruksi Hukum Penataan Ruang Berkaitan dengan Pemekaran Daerah Otonomi Baru	pentingnya penerapan prinsip good governance, pelibatan masyarakat, pemanfaatan teknologi, pengembangan kemitraan serta penguatan inisiatif lokal dalam setiap tahap perencanaan dan	untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat, adanya Ruang tata kelola dan pengambilan keputusan di daerah otonom baru menjadi arena gerakan kolektif namun dalam penelitian ini lebih berfokus pada

			pelaksanaan tata ruang, untuk mencapai kesejahteraan bersama	mobilisasi aktor lokal dan komunitas yang pro dan kontra sedangkan penelitian penulis lebih melihat dari aspirasi Masyarakat.
--	--	--	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas belum banyak kajian yang melihat aksi kolektif serta gerakan sosial dari panitia pemekaran terkait dengan tuntutan Masyarakat, serta terkait dengan pemekaran wilayah, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan melihat aksi kolektif yang mengarah pada Gerakan sosial dari Masyarakat yang berasal dari tuntutan yang dilatar belakangi oleh kesenjangan yang terjadi.

Perbedaan mendasar penelitian ini, dengan penelitian terdahulu, terletak pada fokus analisis dan kerangka teori yang digunakan, penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aktor politik, konflik, serta pemerintah, sehingga kekurangan utamanya dalam melihat aspirasi Masyarakat yang membuat tuntutan agar segera terealisasikan.

Oleh karena itu kebaruan penelitian ini lebih berfokus pada adanya aksi kolektif dan gerakan sosial yang dilakukan yang bergerak dalam gerakan sosial yang memiliki tujuan bersama yang didukung oleh kesolidaritasan antar kelompok yang muncul karena adanya kesenjangan yang terjadi, sehingga Masyarakat menuntut untuk pemekaran ini segera direalisasikan.

1.8 Kerangka pemikiran

Isu pemekaran kabupaten toraja barat pertama kali muncul pada tahun 2003, selanjutnya 2013 dan 2022 hal ini, di latar belakang oleh tuntutan Masyarakat toraja barat akibat adanya kesenjangan yang terjadi dalam Masyarakat toraja barat dengan kabupaten induk (Kabupaten Tana Toraja), hal ini yang mendorong munculnya tuntutan pro pemekaran sehingga terbentuknya Aksi kolektif, yaitu pembentukan panitia pemekaran kabupaten toraja barat dengan tujuan terbentuknya Kabupaten toraja barat dengan harapan meratanya Pembangunan yang dapat menunjang kesejahteraan rakyat.

Dalam isu pemekaran kabupaten toraja barat sudah mendapat dukungan, mulai dari Masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, anggota partai politik, pemerintah serta pemuda organisasi, yang merasa bahwa kesenjangan yang terjadi sudah mengganggu, kehidupan banyak orang di toraja bagian barat, yang mengakibatkan Masyarakat jalan salah satunya dengan ide pemekaran, sehingga membentuk gerakan sosial, agar tuntutan masyarakat bisa lebih terstruktur.

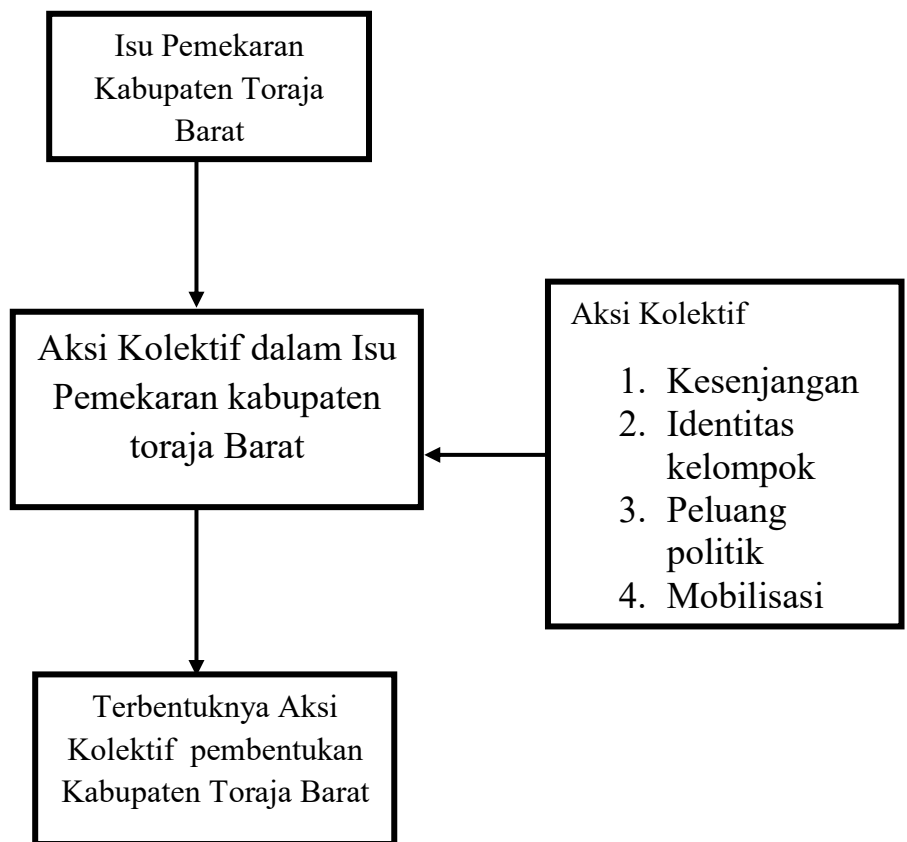
Aksi kolektif dalam pandangan Sidney Tarrow tindakan bersama yang dilakukan oleh sekumpulan orang karena adanya tujuan yang ingin dicapai yang dorongan oleh Masyarakat itu sendiri, yang memunculkan kelompok yang memiliki tujuan bersama, dalam hal ini panitia pemekaran kabupaten toraja barat yang bertugas untuk mengumpulkan syarat-syarat pemekaran, aspirasi Masyarakat dan meminimalisir terjadinya konflik. hal ini di ikat oleh solidaritas itu sendiri yang bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan yang terjadi, sehingga munculnya keadilan bagi kedua belah wilayah.

Dalam aksi kolektif, merupakan salah satu langkah formal, yang dapat menciptakan Gerakan Sosial yang terstruktur dan jelas, untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh kelompok, olehnya itu panitia pemekaran kabupaten toraja barat di isi oleh beragam umur yang dapat menawarkan ide dan strategi dalam penyusunan syarat pemekaran.

Dalam isu pemekaran kabupaten toraja barat, dilatar belakangi oleh faktor-faktor aksi kolektif seperti kesenjangan, adanya identitas kelompok, terdapat peluang politik dan adanya mobilisasi sumber daya, yang mempengaruhi terbentuknya aksi kolektif masyarakat yang diawali dari aspirasi dan tuntutan hal ini yang mempengaruhi terbentuknya aksi kolektif dan condong ke dalam Gerakan Sosial dalam sebuah Pemekaran yaitu pembentukan kabupaten toraja barat. Dalam Isu pemekaran Kabupaten Toraja Barat dilatarbelakangi oleh faktor-faktor aksi kolektif seperti kesenjangan pembangunan, di mana warga mengalami akses terbatas terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan dibandingkan wilayah induk Tana Toraja. Kesenjangan ini memicu aspirasi awal masyarakat untuk tuntutan administratif yang lebih dekat, sejalan dengan kerangka Sidney Tarrow di mana kesenjangan menjadi pemicu utama aksi kolektif yang dapat berreformasi ke Gerakan sosial,

Proses ini dimulai dari keluhan lokal yang berkembang menjadi tuntutan formal melalui deklarasi dan pengumpulan dukungan, Selain kesenjangan, terdapat identitas kelompok yang kuat di kalangan 8 kecamatan Toraja bagian Barat, di mana rasa kesadaran "kami" dibangun melalui narasi perjuangan 28 tahun dan simbol budaya lokal untuk memperkuat solidaritas. Identitas ini, berfungsi sebagai perekat yang mengubah aspirasi individu menjadi tindakan bersama, seperti pembentukan panitia pemekaran yang mewakili kepentingan kolektif. Tanpa identitas ini, mobilisasi sulit bertahan, sehingga menjadi fondasi aksi kolektif yang terorganisir, Peluang politik seperti dukungan bupati dan DPRD Tana Toraja (2025) serta celah desentralisasi pasca-UU 23/2014, dikombinasikan dengan mobilisasi sumber daya (lobi elite, KTP dukungan, dana komunitas), mempercepat terbentuknya aksi kolektif masyarakat. Faktor-faktor ini saling mempengaruhi, di mana aspirasi dan tuntutan awal dimanfaatkan untuk membentuk panitia sebagai wadah aksi kolektif, yang berpotensi eskalasi menjadi gerakan sosial jika kontestasi meluas.

1.9 Skema pemikiran



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Dan Pendekatan

Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus utama dari penelitian Adalah memahami fenomena sosial-politik yang mendalam yaitu Gerakan sosial dalam isu pemekaran kabupaten terkait Pemekaran kabupaten di Tana Toraja yaitu Toraja Bagian Barat, dengan penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan makna dampak dan faktor yang ditimbulkan dari pembentukan aksi kolektif dan pemekaran tersebut terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan melalui beberapa metode seperti observasi dan wawancara mendalam penggunaan metode ini akan membantu menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman serta perspektif Masyarakat di Toraja Barat terhadap pemekaran kabupaten di Toraja Barat.

Dalam penelitian ini jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan Gambaran yang jelas mengenai Gerakan Sosial pemekaran dalam isu pemekaran kabupaten Toraja Barat. Deskripsi ini mencakup detail-detail penting tentang bagaimana isu pemekaran kabupaten dilaksanakan, dilihat dari siapa yang terlibat, dampak yang ditimbulkan, baik secara sosial bahkan secara politik olehnya itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana isu pemekaran kabupaten Toraja barat di mobilisasi dengan adanya aksi kolektif panitia pemekaran dalam isu pemekaran kabupaten toraja barat. (Bahiyah & Gumiandari, 2024, p. 18)

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di kecamatan Saluputti, malimbong balepe dan rembon, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Pemilihan Lokasi penelitian karena dikecamatan saluputti tepatnya dilembang Ulusalu karena panitia pemekaran kabupaten Toraja Barat cenderung Masyarakat di lembang Ulusalu, pada kecamatan malimbong balepe pemilihan kecamatan ini dikarenakan dalam isu pemekaran, kecamatan ini akan dijadikan ibu kota hal ini dapat kita lihat karena luas wilayahnya dan pada kecamatan rembon pemilihan wilayah karena kecamatan ini lebih dekat dengan Tana toraja (perbatasan tana toraja dan toraja barat) pemilihan beberapa kecamatan ini diharapkan dapat memberikan Gambaran yang komprehensif mengenai aksi kolektif dalam isu pemekaran kabupaten Toraja Barat.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada rentan waktu yang telah ditentukan yaitu bulan Desember 2025 hingga Februari 2026, selama periode tersebut pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan pemekaran kabupaten Toraja Barat, wawancara mendalam dengan Panitia

Pemekaran serta masyarakat dan tokoh adat (Ketua Panitia, sekretaris dan divisi bidang mobilisasi massa dan aksi, tokoh adat, Ketua organisasi pemuda, dan anggota partai politik yang mendukung pemekaran, serta Masyarakat sekitar waktu ini dipilih agar peneliti dapat mengumpulkan data yang relevan dalam melihat aksi kolektif panitia pemekaran dalam isu pemekaran kabupaten toraja barat.

2.3 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive* atau sengaja, Teknik ini digunakan karena penelitian ini membutuhkan informasi spesifik yang hanya bisa diperoleh dari individu-individu yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu pemekaran kabupaten toraja barat informan yang dipilih Adalah mereka yang diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terkait Gerakan Sosial dalam isu pemekaran kabupaten toraja barat berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan posisi mereka dalam Masyarakat.

Alasan dalam memilih Teknik *purposive* karena tidak semua orang dalam Masyarakat memiliki Tingkat pengetahuan dan keterlibatan yang sama terhadap isu pemekaran kabupaten toraja barat, dengan memilih informan secara sengaja, diharapkan dapat diperoleh data yang lebih valid dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi dari individu yang memiliki peran penting dalam Masyarakat terkait konflik yang terjadi, sehingga hasil penelitian bisa lebih dalam dan terarah. Penelitian informan dibagi menjadi beberapa kategori yaitu:

NAMA	JABATAN	JUMLAH
DRS. YUSUF SURAH TANDIRESUNG	KETUA UMUM PANITIA PEMEKARAN	1
SUMARTOYO S.PD., M.SI	SEKRETARIS PANITIA PEMEKARAN	1
ROMBAH MARANNU SOMBOLINGGI DRS. YUSUF SURAH TANDIRESUNG	TOKO ADAT	2
HARMASTANTO BALLUNG KALALEMBANG, S.AG	KETUA ORGANISASI PEMUDA GMNI TANA TORAJA	1
IBU RAHMAWATI BAPAK AGUSTINUS	CAMAT REMBON SEKCAM MALIMBONG BALEPE	2
DRA. FIRMINA TALLULEMBANG	ANGGOTA DPRD TANA TORAJA	1
MARTHINUS TANDIONGAN	BIDANG MOBILISASI MASSA DAN AKSI	1
PAK ILLA, IBU DORCE	MASYARAKAT SEKITAR	2
TOTAL		10

2.4 Teknik Pengumpulan data

2.4.1 Sumber Primer

Sumber Data primer adalah data yang dikumpulkan dan di berikan langsung kepada penulis apabila turun langsung kelapangan. Hal ini menjadi informasi utama yang di kumpulkan secara langsung dalam proses penelitian.

1. Observasi

Penelitian ini melibatkan observasi langsung terhadap perilaku, interaksi dan situasi sosial di lapangan, melihat bagaimana dukungan masyarakat serta melihat kesenjangan apa saja yang terjadi di toraja bagian barat, dengan fokus pada perilaku masyarakat, interaksi antar warga, dan situasi sehari-hari yang mencerminkan dukungan terhadap pemekaran wilayah. mulai dari jalan hingga pembangunan. Peneliti mengamati secara detail seluruh keadaan, mulai dari tokoh masyarakat hingga interaksi sosial dan keseharian masyarakat di toraja barat.

Observasi ini menjadi pelengkap data bagi data wawancara didalamnya, memberikan pemahaman kontekstual yang lebih kaya mengenai bagaimana nilai-nilai kehidupan masyarakat di toraja bagian barat, yang terkait dengan is pemekaran toraja barat.

2.Wawancara Mendalam

Wawancara akan dilakukan, kepada Ketua Panitia, sekretaris dan divisi bidang mobilisasi massa dan aksi, tokoh adat, Ketua organisasi pemuda, dan anggota partai politik yang bertujuan untuk menggali pandangan mereka terkait Isu pemekaran Toraja barat.

Dalam penelitian ini, wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama untuk menggali pandangan dan pemahaman informan mengenai isu pemekaran kabupaten toraja barat, melihat gerakan sosial apa saja yang telah dilakukan dan akan di lakukan untuk mendukung isu pemekaran ini, wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-struktural, yang dimana peneliti menggunakan pedoman pertanyaan sebagai acuan, namun tidak menyampaikan pertanyaan secara langsung atau eksplisit kepada informan.

Proses wawancara ini dilakukan secara langsung di rumah informan dengan suasana santai dan tidak formal atau menyesuaikan waktu dan kegiatan informan, hal ini dilakukan agar informan merasa nyaman dan bebas dalam menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka, peneliti membangun dialog

dengan mengajak informan bercerita mengenai pengalaman mereka dalam mendukung atau menolak isu pemekaran toraja barat ini, sehingga wawancara berkembang secara alami tanpa tekanan atau batasan formal. Untuk menjaga keterarahan isi wawancara, peneliti tetap mengacu pada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, teknik probing atau pendalaman digunakan secara halus untuk menggali lebih lanjut bagian-bagian penting dari cerita informan, yang berkaitan dengan gerakan sosial dalam isu pemekaran toraja barat.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan keterkaitan mereka dengan isu yang diteliti, melalui wawancara mendalam ini, peneliti mendapatkan data yang menjadi dasar dalam membangun analisis mengenai gerakan sosial dalam isu pemekaran Kabupaten Toraja Barat, menggunakan daftar pertanyaan di bawah.

1. KETUA UMUM PEMEKARAN

1. Sebagai ketua umum, bagaimana bapak melihat dan menjelaskan apa yang menjadi latar belakang munculnya tuntutan pemekaran toraja barat, apa saja masalah yang terjadi dan ketertinggalan apa saja yang paling kuat di rasakan masyarakat wilayah barat ini?
2. Apakah ada identitas yang memaknai kami sebagai salah satu kesatuan yang berbeda dari wilayah lain?
3. Apa saja peluang politik yang akan terjadi nantinya jika pemekaran ini dilaksanakan?
4. Bagaimana strategi bapak untuk bisa menggerakkan masyarakat serta panitia sehingga aktif dalam mendukung isu pemekaran ini?
5. Tantangan apa saja yang bapak rasakan dalam mengendalikan panitia serta komentar dari masyarakat, dan cara bapak untuk meminimalisir kontra dan pro.
6. Aksi apa saja yang dilakukan panitia dalam menggaungkan isu pemekaran kabupaten toraja barat ini?
7. Bagaimana respon negara terkait isu pemekaran ini?
8. Apakah jauh ini bapak mengurus panitia dan menurut pandangan bapak apakah Toraja barat ini sudah layak atau belum untuk dimekarkan menjadi salah satu kabupaten?

2. SEKRETARIS PANITIA PEMEKARAN

1. Menurut pandangan bapak apa yang menjadi dasar terbentuknya tuntutan pemekaran toraja barat?
2. Dilihat dari kesenjangan yang terjadi apakah ini menjadi salah satu yang mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap pemekaran?

3. Strategi yang dilakukan panitia dalam mengirim dokumen untuk persetujuan sk kepada bupati?
4. Bagaimana panitia mengelola sumberdaya manusia dan keuangan untuk surat menyurat serta rapat?
5. Aksi apa saja yang dilakukan panitia dalam menggumpalan dana guna untuk membantu kerja-kerja panitia

3. TOKOH ADAT

1. Apa dasar sehingga anda mendukung isu pemekaran toraja barat ini?
2. Menurut pandangan ibu apakah identitas yang terjalin memaknai kamu, sebagai salah satu kesatuan yang berbeda dari mereka?
3. Apakah dalam isu pemekaran ini ada kekhawatiran terkait pemecahbelahan adat?
4. Apa saja kontribusi yang dilakukan tokoh adat dalam mendukung isu pemekaran ini?
5. Menurut pandangan ibu apakah isu pemekaran toraja barat ini sudah layak atau belum?

4. KETUA ORGANISASI PEMUDA

1. Bagaimana pendapat anda terkait isu pemekaran toraja barat ini. Apakah mendukung, ragu bahkan menolak isu pemekaran ini?
2. Apakah organisasi kakak sudah pernah membahas terkait isu ini?
3. Apa saja gerakan2 yang dilakukan pemuda sebagai kontribusi dalam hal ini, mendukung bahkan menolak ?
4. Apakah ada gerakan panitia, untuk mengajak bahkan diskusi dengan organisasi?
5. Menurut anda apakah pemekaran kabupaten toraja barat ini sudah layak atau belum?

5. KETUA CAMAT

1. Bagaimana sikap anda sebagai kepala camat terhadap rencana pemekaran kabupaten toraja barat (apakah mendukung,ragu atau menolak) dan alasannya apa?
2. Kesenjangan apa saja yang di rasakan pada kecamatan ini yang belum di perhatikan dan bagaimana pandangan anda terkait kecamatan simbuang dan mappak terkait kesenjangannya?
3. Sejauh mana keterlibatan anda dalam isu pemekaran ini?
4. Apakah bapak pernah mendengar terkait pro dan kontra dari masyarakat terkait isu pemekaran ini?

5. Bagaimana anda melihat kecamatan ini, apakah telah sejahterah ?
6. Harapan bapak kepada pemerintah jika toraja barat ini berhasil dimekarkan?

6. ANGGOTA DPRD TANA TORAJA

1. Apa yang menjadi dasar sehingga ibu mendukung hingga ingin memfasilitasi panitia dan gubernur sulsel ?
2. Jika kita melihat dari sisi politik pemerintahan, menurut ibu apa saja peluang politik / kesempatan bagi aktor atau kelompok. Yang dapat terjadi mulai dari isu sampai dengan pemekaran kabupaten toraja barat jika terlaksana nantinya?
3. Se jauh ini, kontribusi ibu dalam isu pemekaran saja sebagai figur yang mendukung pemekaran toraja barat?
4. Apa saja yang menjadi Strategi ibu dalam mengupayakan/mendorong isu pemekaran ini?
5. Apakah ada kekhawatiran ibu jika pemekaran ini terlaksana?
6. Harapan ibu, jika pemekaran ini terwujud?

7. MASYARAKAT

1. Bagaimana tanggapan ibu/bapak terkait isu pemekaran toraja barat ini (mendukung, menolak bahkan ragu)?
2. Jika kita bicara kesenjangan apa saja yang bapak/ibu rasakan sejauh ini?
3. Apakah ada kekhawatiran jika isu pemekaran ini terlaksana?
4. Apa yang ibu/ bapak lakukan dalam mendukung isu pemekaran ini, kontribusi yang bapak/ibu lakukan ?
5. Harapan bapak/ibu jika kabupaten toraja barat ini terlaksana?

2.4.2 Sumber Sekunder

Data sekunder adalah Sumber data yang tidak langsung di berikan kepada penulis yang di peroleh melalui media perantara, artinya data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh penulis melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, dalam hal ini penulis melihat dari berbagai media yang terkait, melihat arsip BPS Tana Toraja 2024-2025 serta KPU Tana Toraja 2024-2025 .

1.10 Teknik Analisa Data

Menurut (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny, 2014) Data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif Dalam penelitian ini, data dianalisis secara kualitatif dengan mengorganisasi hasil observasi dan wawancara kedalam tema-tema pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, sebelum memasuki tahapan analisis lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu ,menyusun data kedalam matriks berdasarkan hasil wawancara yang

dicatat segera setelah proses wawancara berlangsung. Pencatatan dilakukan berdasarkan ingatan peneliti sesaat setelah interaksi dengan informan, sehingga informasi yang dikumpulkan masih segar dan dapat direkam secara utuh matriks tersebut kemudian menjadi dasar dalam proses identifikasi pola, pengelompokan tema, Serta penyusunan narasi hasil penelitian. Proses ini dilakukan secara manual dengan isu-isu seperti gerakan sosial, aksi kolektif, pemekaran kabupaten toraja barat , kesenjangan, dukungan hingga harapan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa analisis berjalan secara sistematis, relevan dan selaras dengan tujuan penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Reduksi data

Data yang telah dikumpulkan akan direduksi, yaitu disederhanakan dan diseleksi berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, proses ini bertujuan untuk menyingkirkan informasi yang tidak relevan dan memfokuskan pada data yang mendukung penelitian tentang gerakan sosial dalam isu pemekaran kabupaten toraja barat.

Dalam proses ini, peneliti mengandalkan pencatatan berdasarkan ingatan langsung setelah wawancara selesai dilakukan. Setiap kali selesai mewawancarai informan, peneliti segera menyusun kembali informasi yang telah diperoleh dalam bentuk ringkasan dan memasukkan ke dalam matriks wawancara, dengan mencatat kategori informan, pokok pertanyaan dan isi jawaban secara sistematis, setelah semua data terangkum dalam matriks, peneliti melakukan pengelompokan informasi secara manual menggunakan teknik coding tematik, yakni mengidentifikasi tema-tema penting seperti kondisi ekonomi, sosial, politik dan melihat aksi kolektif seperti kesenjangan, identitas kelompok, peluang politik dan mobilisasi sumber daya. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan penyaringan dan pemfokusan data yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Reduksi data ini menjadi dasar dalam analisis selanjutnya agar penyajian data lebih terarah dan mendalam.

2. Penyajian data

Tahapan kedua adalah penyajian data, setelah data direduksi, data disajikan dalam bentuk narasi deskripsi yang memuat tema-tema utama yang telah diidentifikasi sebelumnya, penyajian ini memberi gambaran yang jelas tentang fenomena gerakan sosial terkait pemekaran kabupaten, peran panitia dan masyarakat terhadap isu pemekaran kabupaten toraja barat. Pengujian ini dilakukan dengan mengacu pada struktur tematik, seperti seperti kondisi ekonomi, sosial, politik dan melihat aksi kolektif seperti kesenjangan, identitas kelompok, peluang politik dan mobilisasi sumber daya. Peneliti menata data berdasarkan kategori informan yang fokus dengan isu yang diangkat, lalu merangkainya dalam

bentuk uraian naratif yang disertai kutipan langsung dari wawancara yang telah dicatat. Setiap kutipan dipilih secara selektif untuk mendukung tema yang dibahas dan mencerminkan keragaman pandangan informan . proses penyajian dilakukan secara bertahap, dimulai dari isu yang paling mendasar hingga menuju isu yang bersifat analisis, agar pembaca dapat mengikuti alur pemikiran secara logis dan sistematis. Dengan penyajian seperti data yang telah dikumpulkan tidak hanya di tampilan sebagai fakta, tetapi juga di analisis dalam konteks sosial dan politik terkait isu pemekaran kabupaten toraja barat.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis mendalam terhadap data yang telah disajikan, maka peneliti akan menarik kesimpulan mengenai gerakan sosial dalam isu pemekaran toraja barat Penarikan kesimpulan dimulai sejak pengumpulan data, saat peneliti mencari makna, mencatat keteraturan, serta mengidentifikasi kemungkinan konfigurasi, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan ini akan menjadi hasil akhir yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.